

Nama : Fadhea Salfinabila Arianti
NIM : 23050974150
Kelas : PTI D

Resume hari ke 5

Materi ini membahas secara komprehensif kebijakan, tata kelola, serta implementasi kerja sama di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai bagian dari strategi penguatan institusi dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Kerja sama dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Pada bagian awal, disampaikan bahwa kebijakan kerja sama UNESA berlandaskan pada beberapa regulasi resmi universitas. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Rektor UNESA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020–2024 yang menjadi arah pembangunan jangka menengah universitas. Selain itu, pelaksanaan kerja sama juga mengacu pada Peraturan Rektor UNESA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya serta Peraturan Rektor UNESA Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya. Seluruh ketentuan tersebut dipertegas melalui Buku Pedoman Kerja Sama UNESA Tahun 2024 sebagai panduan teknis pelaksanaan kerja sama di lingkungan universitas.

Tata kelola kerja sama di UNESA dirancang secara sistematis dan terstruktur agar pelaksanaannya berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Tahap perencanaan kerja sama dilaksanakan secara kolaboratif oleh pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, hingga pimpinan unit terkait. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dibangun selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan strategis UNESA. Selanjutnya, tahap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit pelaksana sesuai dengan ruang lingkup dan bentuk kerja sama yang telah disepakati bersama mitra.

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan kerja sama, UNESA menerapkan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh unsur pimpinan terkait, seperti wakil dekan II, kasubdit kerja sama, serta pimpinan lainnya yang memiliki kewenangan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan kerja sama berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal. Setelah itu, evaluasi kerja sama dilaksanakan melalui pengisian survei oleh mitra serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan unit pelaksana. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas kerja sama sekaligus sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Tahap akhir dari tata kelola kerja sama adalah pelaporan, di mana setiap unit wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama melalui sistem Simkerma dan Lapkerma sebagai bentuk akuntabilitas institusi.

Materi juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap dokumen-dokumen kerja sama. Salah satu dokumen utama adalah Implementation Agreement (IA) yang

bersifat program studi-wide. Artinya, setiap program studi yang terlibat dalam kerja sama harus memiliki IA tersendiri meskipun mitra yang terlibat sama. Dokumen IA ditandatangani oleh dekan atau koordinator program studi serta pihak mitra, dan tidak harus oleh pimpinan tertinggi mitra. IA berfungsi sebagai dasar operasional pelaksanaan kerja sama di tingkat program studi. Selain itu, laporan kerja sama disusun secara ringkas dalam satu lembar yang memuat judul kerja sama, referensi dokumen kerja sama, mitra kerja sama, ruang lingkup kegiatan, hasil pelaksanaan, serta tautan dokumentasi berupa foto atau video kegiatan yang disimpan melalui Google Drive.

Selanjutnya, materi menekankan adanya transformasi paradigma kerja sama di lingkungan UNESA. Kerja sama tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemenuhan administrasi atau jumlah dokumen semata, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Kerja sama diarahkan untuk mendukung pencapaian IKU, meningkatkan kualitas lulusan, memperluas jejaring institusi, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia industri.

Sebagai penutup, disampaikan bahwa pengembangan kerja sama UNESA mengadopsi pendekatan **Triple Helix**, yaitu sinergi antara akademisi, pemerintah, dan industri. Dalam pendekatan ini, akademisi berperan menghasilkan kajian ilmiah dan rekomendasi berbasis riset, pemerintah berperan dalam penyediaan kebijakan dan lingkungan yang mendukung, sedangkan industri berperan dalam hilirisasi inovasi dan penyediaan sarana pendukung produksi serta komersialisasi. Sinergi ketiga unsur tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing institusi serta mendorong pembangunan regional yang berkelanjutan.